



SOSIALISASI DAN WORKSHOP TATA KELOLA PEMERINTAHAN MELALUI INDIKATOR PEMERINGKATAN E-GOVERNMENT DI INDONESIA (PEGI) DI KABUPATEN INDRAMAYU

AUTHOR

¹⁾Kraugusteeliana, ²⁾Intan Hesti Indriana, ³⁾Erly Krisnanik,
⁴⁾Anita Muliawati, ⁵⁾Rudhy Ho Purabaya

ABSTRAK

Tujuan: Di Indonesia penerapan e-government telah diatur melalui sebuah Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Saat ini pemerinkkatan e-government khususnya di kabupaten Indramayu perlu dilakukan dengan intensif khususnya dalam hal ini desa Pabean Udik sebagai desa percontohan yang akan dijadikan pilot project tim pengabdian dari UPNVJ. Kegiatan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali pelaksanaan. Metode: *Focus Grup Discussion* (FGD) dan Sosialisasi diikuti oleh semua aparat desa. Sosialisasi pemerinkkatan PeGI e-government dengan materi pembahasan semua indikator 5 (lima) dimensi PeGI dalam bentuk workshop. Hasil: Melalui sosialisasi ini dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali juga di Kabupaten Indramayu khususnya di Desa Pabean Udik kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan. Kesimpulan: Terlihat kenaikan pemahaman berdasarkan hasil *pre test* semula 28% dan diakhir sosialisasi melalui *post test* dengan materi yang sama mendapatkan 89%. Hal ini menunjukkan ada keinginan para petugas/aparatur untuk menjadikan pabean udik lebih baik lagi dalam tatanan tata kelola elektronik sesuai dengan harapan Tim Pelaksana Pengabdian skema PPDI.

Kata Kunci

PeGi, E-Government, Pemerinkkatan, Pabean Udik, Indramayu

AFILIASI

Prodi, Fakultas
Nama Institusi
Alamat Institusi

¹⁻⁵⁾Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer

¹⁻⁵⁾Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

¹⁻⁵⁾Jl. RS. Fatmawati Raya No.1, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta-12450

KORESPONDENSI

Author
Email

Kraugusteeliana
kraugusteeliana@upnvj.ac.id

LICENSE



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Di Indonesia penerapan *e-government* telah diatur melalui sebuah Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Inpres nomor 3 tahun 2003 menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif yang merupakan *good government* di Indonesia, sehingga secara otomatis sejak dikeluarkannya Inpres ini seluruh lini di pemerintahan baik dari tingkat pusat, maupun tingkat provinsi/kabupaten dan kota, dan pemerintah desa. Saat ini pemeringkatan kabupaten Indramayu belum masuk dalam pemeringkatan walaupun potensi dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak diterapkan di kabupaten Indramayu khususnya dalam hal ini desa Pabean Udik sebagai desa percontohan dalam pengabdian yang tim fokuskan.

Kegiatan dilakukan sebanyak 2 meliputi FGD dan Sosialisasi *e-government* yang akan diikuti oleh semua aparat desa khususnya di desa pabean udik. Adapun kegiatannya pertama wawancara atau forum diskusi dengan kepala desa atau kuwu dan sekretarisnya terkait pemahaman pemeringkatan ini dilanjutkan tahapan berikutnya sosialisasi pemeringkatan PeGI *e-government* dengan materi pembahasan semua indikator 5 dimensi PeGI dalam bentuk *workshop*.

Melalui pendampingan peningkatan tata Kelola *e-government* dengan *framework* pemeringkatan PeGI diharapkan dapat meningkatkan pengembangan dan pemanfaatan TIK di lembaga Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali juga di Kabupaten Indramayu khususnya di Desa Pabean Udik.

METODE PELAKSANAAN

Tim pengabdian pada sosialisasi terlebih dahulu mengadakan tes pemahaman melalui *pre test* dan diakhir kegiatan dari sosialisasi Pemeringkatan *e-government* akan dilakukan *post test* untuk mengukur pemahaman dari apa yang telah disampaikan terhadap materi pemeringkatan PeGI ini. Pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan forum grup diskusi dan wawancara kepada Pak Kuwu untuk mengali permasalahan dan pengetahuan pemeringkatan saat ini. Setelah FGD kami memahami permasalahan dan langsung membuat materi sosialisasi. Besar harapan kami setelah dilakukan sosialisasi dan *workshop* tata Kelola ini, para aparat dapat membangun tata kelola berbasis *e-government* lebih baik lagi. Kegiatan ini akan berkelanjutan dengan pendampingan, *self assessment* dalam memahami penilaian pemeringkatan *e-government* di pemerintahan pada tahun selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan di ruang rapat desa di hadiri oleh kepala desa pak Kuwu dan jajarannya. Tim pengabdian terdiri dari Dosen dan mahasiswa yang dilibatkan. Pada sosialisasi ini kami memperkenalkan pentingnya memahami tata Kelola dan adanya pemeringkatan tata Kelola secara elektronik atau *e-government* terkait pemerintahan di Indonesia. Tujuan kegiatan Pengabdian Masyarakat adalah memberi pengetahuan kepada Masyarakat dalam hal ini aparat, Meningkatnya literasi terkait pemeringkatan digital atau *e-government* dilingkungan Pabean Udik dan pendampingan pemenuhan dokumen yang seharusnya ada di dalam tata Kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan adanya rencana ke depannya akan menjadikan Pabean udik sebagai salah satu *smart village* di kabupaten Indramayu.





Gambar 1. Siklus tata kelola

Sebelum melaksanakan sosialisasi kami berdiskusi terkait materi yang akan kami sosialisasikan serta sejauh mana pemahaman akan pemeringkatan PeGI ini.



Gambar 2. Wawancara dan Diskusi dengan Pihak Kecamatan



Gambar 3: Diskusi FGD dengan Kuwu Desa Pabean Udik

Setelah Forum Grup Diskusi dan menetapkan tanggal kegiatan maka selanjutnya pelaksanaan Sosialisasi bertempat di ruang rapat desa pabean udik, yang dihadiri oleh 12 aparat desa dan Bapak Samsul, SH selalu Kuwu Desa Pabean Udik. Sosialisasi ini membahas 5 indikator Dimensi Pemeringkatan tata kelola e-government yang baik meliputi:

1. Dimensi Kebijakan
Dimensi ini membahas kebutuhan akan dokumentasi pemerintah terhadap manajemen visi dan misi terkait TIK dalam bentuk surat keputusan, peraturan, regulasi, kebijakan, pedoman, atau rencana strategis yang sudah di informasikan ke Masyarakat melalui laman *website* desa pabean udik. Indikator lainnya adalah strategi penerapan kebijakan, peraturan terkait pemanfaatan TIK dan beberapa detail prioritas terhadap TIK lainnya.
2. Dimensi Kelembagaan
Dimensi ini berkaitan dokumentasi keberadaan organisasi, lembaga, atau unit kerja yang berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan dan pelaksanaan e-government. Penilaian pada dimensi kelembagaan dilakukan terhadap aspek keberadaan struktur organisasi yang efektif, adanya dokumen tentang SDM (TUPOKSI, ketersediaan SDM, kompetensi dan pengembangan SDM).
3. Dimensi Infrastruktur
Dimensi ini membahas akan keberadaan *data center* dan aplikasi pendukung, jaringan komunikasi (LAN, WAN, internet), keamanan, fasilitas pendukung sampai dengan pemeliharaan infrastruktur TI.



4. Dimensi Aplikasi

Dimensi yang membahas pemenuhan akan situs web (*homepage*) terkait pelayanan publik, fungsi administrasi dan manajemen umum dalam penggunaan aplikasi di pabean udik, manajemen keuangan dan fungsi kepegawaian serta inventaris aplikasi TIK yang di pergunakan untuk melihat kesesuaian antara ketersediaan dan tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana serta tugas dan fungsi sudah berjalan baik atau belum.

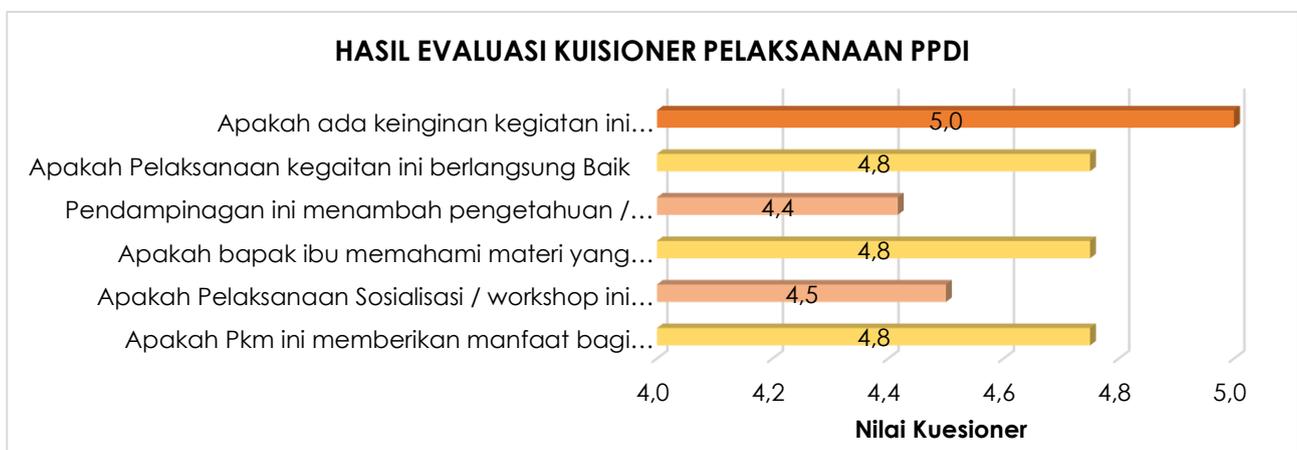
5. Dimensi Perencanaan

Dimensi perencanaan menjelaskan terkait tata kelola atau manajemen perencanaan TIK secara terpadu dan berkelanjutan.



Gambar 4: Foto Kegiatan Sosialisasi Bersama Pak Kuwu Desa Pabean Udik dan Para Aparatur Serta di Dampingi Tim Pengabdian Juga Mahasiswa

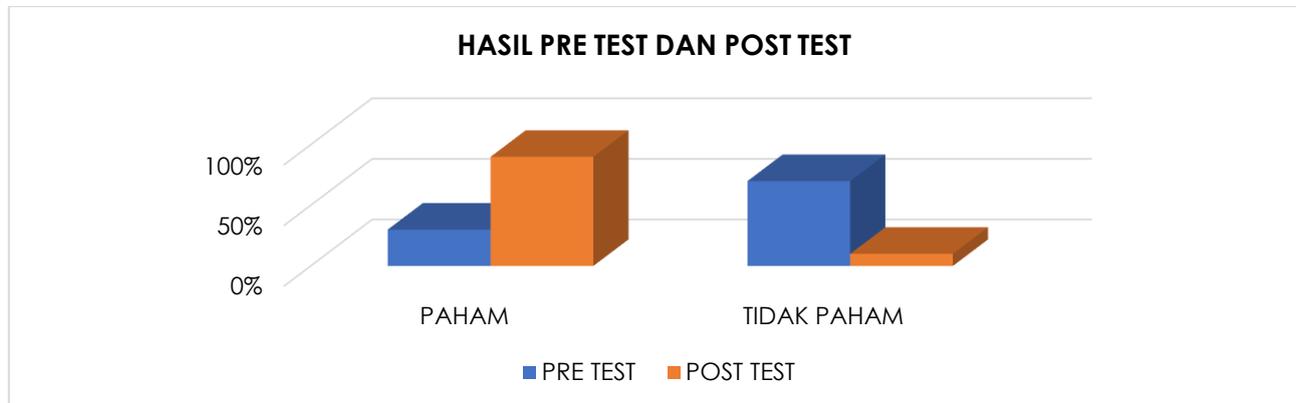
Di akhir kegiatan kami melakukan evaluasi pelaksanaan sebagai perbaikan di kemudian hari dengan hasil evaluasi dari kuesioner yang diberikan mendapatkan hasil respons yang positif dan adanya pencerahan penambahan pengetahuan dalam hal pemeringkatan ini, seperti terlihat pada hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini.



Gambar 5: Evaluasi Kegiatan Sosialisasi



Berdasarkan hasil evaluasi sejalan juga dengan hasil *post test* yang telah dianalisis terdapat kenaikan pemahaman. Pengetahuan dan keinginan untuk perbaikan oleh para aparatur yang terlibat dalam kegiatan ini walaupun hasil *post test* belum mencapai 100% tetapi kenaikannya cukup signifikan dari 28% mencapai pemahamannya 89% seperti terlihat pada hasil *pre test* dan *post test* yang telah dilakukan.



Gambar 6. Perbandingan hasil *Pre test* dan *Post Test* kegiatan

❖ Solusi Permasalahan

Berdasarkan hasil FGD dan sosialisasi yang sudah diberikan terdapat permasalahan kesiapan pemerintah menuju Desa cerdas dan perbaikan tata kelola TIK dan *e-government* maka diperlukan pendampingan lebih lanjut pada PKM tahun 2023 kepada semua kepala desa di kabupaten Indramayu sebagai sampel diawali oleh Desa Pabean Udik. Dengan pendampingan tersebut maka secara otomatis pemerintah mengetahui kekurangan dalam penerapan TIK di masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan terlihat kenaikan pemahaman berdasarkan hasil *pre test* semula 28% dan di akhir sosialisasi *post test* dengan materi yang sama mendapatkan 89%. Terlihat ada keinginan para petugas / aparatur pemerintah untuk menjadikan pabean udik lebih baik lagi dalam tatanan tata kelola elektronik. Untuk itu rekomendasi kami perlu perbaikan dalam pengelolaan halaman web agar masyarakat mendapat informasi secara berkala dan *update* terkait kegiatan yang dilakukan pemerintah di desa pabean udik. Tim Pengabdian akan melanjutkan PKM di desa pabean udik pada tahun yang akan datang untuk memantau kesiapan melalui pendampingan penilaian *self assessment*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada bapak ibu aparatur / staf di Pabean Udik Kabupaten Indramayu khususnya Pak Kuwu Bapak Samsul, SH dan Sekretaris Ibu Yeny. Tim PPDI tidak lupa berterima kasih kepada LPPM (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) UPN Veteran Jakarta yang telah memberikan pendanaan hibah internal skema PPDI (Percepatan Pembangunan Desa di Indramayu) dan terima kasih kepada seluruh Tim Dosen dan Mahasiswa yang terlibat pada pelaksanaan Sosialisasi Peningkatan ini.

REFERENSI

Deffy Susanti, Wahyuno (2022). Pengukuran Peningkatan Tata Kelola E-Government Analisis Dengan Metode Pegi Di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Sopiandi, . Infotech journal <https://doi.org/10.31949/infotech.v8i1.1609> ISSN : 2460-1861



- A Muliawati, T Rahayu, IH Indriana, K Kraugusteeliana (2022). Desain Tampilan aplikasi sistem Pelayanan Masyarakat Desa Dengan metode goal-directed design. Jurnal Ilmiah Matrik 23 (2), 229-238
- Direktorat e-Government. (2011). Pemeringkatan eGovernment Indonesia (PeGI) Tingkat Provinsi Tahun 2011, Dirjen Aptika Kemenkominfo.
- Inpres No. 3 Tahun 2003. (2003). Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan eGovernment Indonesia.
- Pacific Council International Policy. (2012). Working Group on e-government in the Developing World, Roadmap for egovernment in the Developing World 10 Questions e-government Leaders Should Ask Themselves
- Ariyani, Pipin Farida. (2009). Kajian Kerangka Kerja Pemeringkatan e-Government di Tingkat Kabupaten/Kotamadya, Karya Akhir, Magister Teknologi Informasi, UI.
- Lely P.D. Tampubolon (2016) Pemeringkatan E-Government Indonesia (Pegi) Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Di DKI Jakarta. Jurnal Sistem Informasi Vol. 8, No. 2
- Palvia Jain, Shailendra and Sharma S. Sushil. (2017). eGovernment and e-Governmenternance : Scientific Journal of Informatic, Vol 2 No. 1 tahun 2015, Model Delone and Mclean Untuk Mengukur Kesuksesan E-Government Kota Pekalongan.
- MAK Harahap, K Kraugusteeliana dkk. (2023). The Role of Information Technology in Improving Urban Governance. Jurnal Minfo Polgan 12 (2), 371-379
- <https://signal.co.id/sosial/lakukan-pengabdian-kepada-masyarakat-upn-veteran-jakarta-sosialisasikan-e-goverment-di-desa-pabean-udik/>
- <https://www.journalnews.id/lakukan-abdimas-upn-veteran-jakarta-sosialisasikan-e-goverment-di-desa-pabean-udik/>

